

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELUARAN
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2016**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



Oleh:

FITRI YENI
155110658

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FITRI YENI
NPM : 155110658
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN
PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIAK TAHUN
2006-2016

No	Tanggal	Sponsor	Co Sponsor	Catatan Pembimbing	Paraf
1	20-09-2018	X		Perbaiki Sesuai Saran dan Data	
2	01-10-2018	X		Teruskan ke Pembimbing II	
3	15-10-2018		X	Perbaiki Satuan Tabel, Rumusan Masalah, Tujuan, Hipotesa, Alat Analisa Data, Program Statistik dan Daftar Pustaka	
4	02-11-2018		X	Analisa Data, Uji Asumsi Klasik dan Sistematika Penulisan	
5	06-11-2018		X	Acc Seminar Proposal	
6	12-11-2018	X		Acc Seminar Proposal	
7	22-01-2019	X		Perbaiki Data dan Kesimpulan	
10	28-01-2019	X		Teruskan ke Pembimbing II	
11	13-02-2019		X	Perbaiki Uji Asumsi Klasik dan Abstrak	
12	14-02-2019		X	Perbaiki Abstrak dan Alasan Pada Pembahasan	
13	15-02-2019		X	Acc Seminar Hasil	
14	18-02-2019	X		Acc Seminar Hasil	

Pekanbaru, 01 April 2019
Wakil Dekan 1

Dr. Firdaus A. Rahman, SE., M.Si., Ak., CA

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : FITRI YENI
NPM : 155110658
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH
DAN PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2016

Team Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si	(.....)
2. Drs. M. Nur, MM	(.....)
3. Drs. H. Armis, M.Si	(.....)

Disetujui :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. H. Detri Karya, SE., MA

Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si

KETUA JURUSAN
EKONOMI PEMBANGUNAN

Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI YENI
NPM : 155110658
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH
DAN PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2016

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. H. Detri Karya, SE., MA

Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si

MENGETAHUI :

DEKAN

KETUA JURUSAN

Drs. Abrar, M.Si., CA

Dra. Hj. Ellyan Sastraningsih, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FITRI YENI
TEMPAT/TGL LAHIR : TANJUNG SAMAK, 17 FEBRUARI 1996
NPM : 155110658
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN
DAERAH DAN PENGELUARAN
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2016

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah murni dari hasil karya saya, bukan merupakan hasil karya orang lain (bukan plagiat/duplikasi) dan sistematika penulisannya sudah mengikuti kaedah dari karya tulis ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apa bila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut untuk hukum yang berlaku.

Pekanbaru, 01 April 2019
Yang Membuat Pernyataan

FITRI YENI

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2016

Oleh :
Fitri Yeni
NPM :
155110658

Dibawah Bimbingan : Prof. Dr. H. Detri Karya SE., MA (Pembimbing I)
Hj. Nawarti Bustamam SE., M.Si (Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan daerah dan pengeluaran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak tahun 2006-2016. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dan kuantitatif yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian di klarifikasikan, di analisis, selanjutnya di intepretasikan sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan. Dengan rumus yang digunakan yaitu regresi berganda dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan program eviews. Sumber data utama yang digunakan adalah dana perimbangan, pendapatan asli daerah, pengeluaran belanja pemerintah dan produk domestik regional bruto dengan migas menurut atas dasar harga berlaku tahun 2006-2016 di Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto sedangkan pengeluaran belanja pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016. Sedangkan secara uji F (Simultan) ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016 dengan R^2 sebesar 67% yang berarti bahwa variabel bebas (dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan pengeluaran belanja pemerintah) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (produk domestik regional bruto).

Kata Kunci : Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Belanja Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL INCOME AND GOVERNMENT EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN SIAK AT 2006-2016

Oleh :
Fitri Yeni
NPM :
155110658

Under the advisor of : Prof. Dr. H. Detri Karya SE., MA (Advistor I)
Hj. Nawarti Bustamam SE., M.Si (Advistor II)

This study aims to determine how the influence of regional income and government expenditure on economic growth in Siak year 2006-2016. The research method used for this writing is descriptive and quantitative research methods carried out by first collecting data that is then clarified, analyzed, then interpreted so that it can provide solutions to problems. With the formula used is multiple regression and data processing used is to use program views. The main data sources used are balance funds, regional original income, government expenditure and gross regional domestic product with oil and gas according to current prices from 2006-2016 in Siak. The results of this study indicate that balancing funds and original regional income do not significantly influence gross regional domestic products while government expenditure significantly influences gross regional domestic products in Siak year 2006-2016. While in the F (Simultaneous) test the three independent variables together have a significant effect on gross regional domestic products in Siak year 2006-2016 with R^2 of 67% which means that the independent variables (balancing funds, regional original income and expenditure) government expenditure) is representative to explain the dependent variable (gross regional domestic product).

Keywords: Balancing Funds, Regional Original Income, Government Expenditures and Gross Regional Domestic Products

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbill Alamin. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak Tahun 2006-2016.”

Penulisan Skripsi ini salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Riau.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas kesalahan dan keterbatasan manusia maupun penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan penulis berharap kesempurnaan seta pengalaman penulis ilmu yang belum sempurna. Oleh karena itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan dapat menyempurnakan pengetahuan penulis. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak selaku Rektorat Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
2. Bapak Drs. Abrar, M.Si., Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

3. Ibu Dra. Hj. Ellyan Sastra Ningsih, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Bapak Prof. Detri Karya, SE., MA selaku Dosen pembimbing I yang telah meluang waktu, merevisi, menyarankan dan menyempurnakan skripsi ini
5. Ibu Hj. Nawarti Bustamam, SE., M.Si juga selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan waktunya juga memberikan arahan dan pikiran untuk kesempurnaan skripsi ini
6. Bapak/ibu Dosen dan serta Staff administrasi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan pengetahuan dan pelayanan selama saya masih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
7. Pihak Instansi Badan Pusat Statistik dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak serta instansi yang terkait yang sudah membantuk saya dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini
8. Kedua orang tua saya Ayah M. Jailani dan ibu Nilam yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan memberikan pengorbanan kasih sayang yang tulus dan banyak hal yang tidak terhitung. Kepada abang dan kakak kandung saya Sofyan Hadi, Sueb Rizal, Syahrul Amin, Yulianti S.Ag dan Nurhidayanti Amd. Keb yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada sahabat saya sedari SMA Ananda Putri, Novira Indrianti, Rahmi Widya Zulfa, Yona Audya Fitri, Novi Triana, Wayana Rosita, Tengku Sri Riski, Mahfuzati Maresta dan Windi Yolanda yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis

10. Sahabat dari awal kuliah yang setia menemani dan siap untuk disusahkan hingga saat ini Ayu Tuttuman, Fitri Mardianingsih, Mutia Dwi Andriani, Putri Rahmadani, Willy Dio Prakoso, Khairul Fikri Adi, Hermanto, Heri Sulistio, Yillzy Burnandes, Suci Lita, Herlyana Gustia dan teman-teman seperjuangan
11. Dan adik-adik pengurus HIMEP maupun anggota serta teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2015 yang telah membantu dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai bahan pertimbangan, acuan serta bagi penulis yang ingin melakukan penelitian yang sama.

Dan buat yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang sebesar-besarnya dan membalas kebaikan mereka, Amin Yarobbalalamin.

Pekanbaru, 23 Desember 2018

Penulis

FITRI YENI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Masalah	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Landasan Teori Terdahulu.....	38
2.3 Hipotesis	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	40
3.2 Populasi dan Sampel.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Teknik dan Pengumpulan Data.....	41

3.5 Operasional Variabel Penelitian	41
3.6 Teknik Analisa Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	
4.1 Gambaran umum Kabupaten Siak	48
4.2 Sejarah Kabupaten Siak	48
4.3 Keadaan geografis Kabupaten Siak	51
4.4 Pemerintahan Kabupaten Siak	53
4.5 Kependudukan	59
4.6 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Distribusi Variabel Penelitian	66
5.2 Hasil Penelitian Variabel	70
5.6 Intrepretasi hasil.....	78
5.6 Pembahasan	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan pembangunan jangka panjang dibidang ekonomi merupakan sasaran pokok yang hendak dicapai antara keseimbangan diberbagai bidang seperti bidang pertanian, perdagangan, industri dan dibidang lain agar terpenuhinya kebutuhan pokok semua masyarakat. Istilah pembangunan ekonomi diartikan sebagai perubahan yang meningkat pada kapasitas produksi nasional. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah rangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi sekaligus merubah struktur perekonomian yang lebih baik.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan

produksi barang dan jasa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dalam diukur dalam jangka panjang dengan menggunakan output perkapita dari Produk Domestik Regional Bruto perkapita.

Menurut Nelson (2006:100-101) laju pertumbuhan penduduk tidak selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan. Pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah tingkat kematian lebih besar dari pada tingkat kelahiran, maka penambahan penduduk adalah negatif. Pada pendapatan perkapita yang lebih tinggi tingkat kematian akan menurun, akan tetapi tingkat kelahiran tidak berubah, oleh karena itu semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita maka semakin kecil tingkat kemunduran penduduk.

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dikatakan baik dengan ditentukan oleh salah satu indikator makro ekonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah masing-masingnya atau dapat diukur dengan laju perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. Salah seorang ahli ekonom Simon Kuznets (1971:99) menjelaskan bahwa “Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.” Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Dewasa ini keinginan negara-negara yang sedang berkembang menggebu-gebu untuk melakukan pembangunan, terutama pembangunan dibidang ekonomi yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan individu namun untuk memenuhi

kebutuhan secara agregat. Salah satunya seperti Negara Indonesia yang saat ini merupakan negara berkembang. Negara Indonesia yang selalu berkeinginan menstabilkan perekonomian. Hal ini dapat dilihat penjelasan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5,01 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen, dan tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ini diperoleh dari Industri Pengolahan yakni 0,91 persen. Selain itu, disusul sektor konstruksi sebesar 0,67 persen, perdagangan 0,59 persen, dan pertanian 0,49 persen. Sumber pendapatan terbesar ditahun yaitu dari industri pengolahan sebesar 0,91 persen. Rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir ini didiperoleh dari industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi ini yang sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). Menurut Sukirno (2005:12) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi suatu wilayah, tanpa memperlihatkan pemilik atas faktor produksinya baik milik penduduk wilayah tersebut maupun milik penduduk wilayah lain.

Penyajian angka-angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut data mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak dilihat dari sisi Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Migas Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2016 Dalam (Rupiah)

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto ADHK dengan Migas (Rupiah)
1	2006	26.215.711.860.000,00
2	2007	33.874.581.640.000,00
3	2008	44.918.496.360.000,00
4	2009	43.799.840.450.000,00
5	2010	54.420.353.850.000,00
6	2011	67.446.587.390.000,00
7	2012	79.303.427.520.000,00
8	2013	82.129.724.430.000,00
9	2014	85.735.522.140.000,00
10	2015	77.235.452.690.000,00
11	2016	78.943.381.950.000,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2018

Dari data tabel 1:1 diatas dapat dilihat laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Migas Atas Dasar Harga berlaku di Kabupaten Siak pada tahun 2006-2016 mengalami fluktuasi akan tetapi lebih sering meningkat tiap tahunnya. Laju pertumbuhan tertinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 85.735.522.140.000,00 dan terendah tahun 2006 sebesar Rp. 26.215.711.860.000,00.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan ekonomi ini tiap tahunnya karena setiap sektor dalam suatu daerah memiliki potensi sumber unggulan yang berbeda. Artinya sektor yang tinggi akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak. Jika pertumbuhan ekonomi ini terus melaju tinggi akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan tidak akan terjadinya ketimpangan antar kecamatan maupun daerah lain.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah juga dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan keuangan, baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Adapun penerimaan daerah dapat berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang salah. Akan tetapi pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dimana Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut dari penghasilan daerah itu sendiri yang bertujuan untuk menambah penerimaan daerah. Hal ini guna untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintahan pusat.

Selain itu adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah yang terbagi atas beberapa komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi jika Pendapatan Asli Daerah tinggi maka semakin kecil pula

ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi yang diberikan oleh pemerintah dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk mengukur kemandirian daerah, maka setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengalokasikan transfer dana ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Berikut untuk melihat kontribusi dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh Kabupaten Siak dapat dilihat pada penyajian tabel dibawah ini:

Tabel 1.2.: Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Siak Tahun 2006-2016 Dalam Rupiah

No	Tahun	Jumlah Dana Perimbangan (Rupiah)
1	2006	1.603.562.603.901,00
2	2007	1.275.080.380.497,18
3	2008	1.483.125.178.426,00
4	2009	1.323.563.714.264,00
5	2010	1.478.235.790.442,00
6	2011	1.489.288.269.445,00
7	2012	1.768.144.667.481,00
8	2013	1.768.816.719.820,00
9	2014	2.097.493.216.241,00
10	2015	1.218.107.619.715,00
11	2016	1.251.262.083.479,00

Sumber : Badan Pusat Statistik dan BPKAD Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan tabel 1:2 diatas dapat dilihat penyajian data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Siak selama sebelas tahun yaitu tahun 2006-2016,

proporsi Dana Perimbangan mengalami fluktuasi tiap tahun. Dari jumlah total tersebut pada tahun 2014 perimaan yang tinggi yaitu sebesar Rp. 2.097.493.216.241, karena pada tahun ini daerah mendapatkan dana bagi hasil pajak dan non pajak yang cukup tinggi dibandingkan tahun lainnya, sedangkan tahun terendah terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.218.107.619.715,00. Adapun faktor penyebab terjadinya penurunan ini karena daerah tidak mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil pajak dan non pajak juga rendah.

Selain dana perimbangan suatu daerah juga memiliki pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dimana pendapatan ini diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu Pedapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber utama keuangan daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang di atas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah yaitu pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diharapkan dan di upayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Berikut adapun laju pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006-2016 Dalam Rupiah

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
1	2006	141.674.790.678,00
2	2007	326.207.278.976,63
3	2008	733.276.414.277,78
4	2009	413.794.582.439,51
5	2010	262.896.647.312,60
6	2011	198.010.055.388,39
7	2012	346.604.319.540,25
8	2013	348.618.602.282,72
9	2014	309.862.790.957,13
10	2015	357.281.966.303,86
11	2016	164.325.689.823,87

Sumber : Badan Pusat Statistik dan BPKAD Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat dari penyajian data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak yaitu tahun 2006-2016, dapat diketahui gambaran Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya berfluktuasi. Dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 733.276.414.277,78 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 141.674.790.678,00.

Dari kedua pendapatan daerah ini baik dari segi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah memiliki perbandingan yang sangat jauh. Dimana jika dibandingkan dari kedua pendapatan tersebut dana perimbangan lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini sangat menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum mandiri dalam mengelola kekayaan sumber daya yang ada dan sumber pendapatan masih bergantung pada pemerintah pusat.

Akan tetapi dengan beberapa pencapaian tersebut, diharapkan daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen dan kemampuan yang dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat yakni dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil serta Pendapatan Asli Daerah akan menjadi tolak ukur dalam pendanaan daerah dan menjadi motivasi bagi daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki dan meningkatkan kemandirian soal pendanaan daerah.

Dalam era desentralisasi pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dapat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Agar dapat tercapainya kewajiban tersebut salah satu

langkah atau kebijakan yang diambil yaitu dengan pemerintah perlu melakukan pengeluaran atau belanja. Dimana belanja tersebut terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan program pemerintah. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Adapun jenis dari belanja tidak langsung seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti belanja pegawai upah honorarium, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Berikut data pengeluaran belanja pemerintah Kabupaten Siak tahun 2006-2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4. : Pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2006-2016 Dalam Rupiah

No	Tahun	Jumlah Belanja Pemerintah (Rupiah)
1	2006	1.409.790.324.020,00
2	2007	1.903.275.258.312,32
3	2008	1.850.231.345.971,44
4	2009	1.929.418.660.938,00
5	2010	1.697.826.203.483,00
6	2011	1.676.721.824.656,00
7	2012	2.071.317.017.756,00
8	2013	2.285.374.036.987,60
9	2014	2.647.677.640.488,00
10	2015	2.690.439.086.559,13
11	2016	2.165.325.183.247,00

Sumber : Badan Pusat Statistik dan BPKAD Kabupaten Siak, 2018

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat dilihat dari penyajian data pengeluaran belanja pemerintah Kabupaten Siak yaitu tahun 2006-2016, dapat diketahui gambaran pengeluaran pemerintah tiap tahunnya berfluktuasi. Dimana pengeluaran terbesar terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 2.690.439.086.559,13 dan pengeluaran terendah terdapat pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 1.409.790.324.020,00.

Dengan adanya penerimaan daerah maka pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan belanja pemerintah guna agar perekonomian berjalan dengan baik dan menjaga kemakmuran masyarakat. Selain itu tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Karena pengeluaran belanja pemerintah ini memiliki hubungan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebab pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang membuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun daerah.

Maka dari itu berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dari itu saya penulis tertarik untuk mengangkat dan menelaah penelitian ini yang berjudul “ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2006-2016.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak tahun 2006-2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun sesuai dengan perumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengelola pendapatan daerah dan pengeluaran belanja pemerintah serta mengambil kebijakan dalam mengatur perekonomian
2. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama ataupun aspek lain dari penelitian ini.
3. Bagi penulis sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman, maka penulis membagi menjadi beberapa bab dari masing-masing sub bab dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan tentang teori yang melandasi dan mendukung dalam penulisan ini serta mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti kondisi geografis daerah, kependuduk, dan perekonomian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan dan tujuan penelitian yang terkait.

BAB VI : PENUTUP

Ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran penulis sebagai sumbangan pemikiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengandung pengertian yaitu sebagai penambahan dari pendapatan nasional atau regional yang terjadi pada suatu negara atau daerah dari satu tahun ketahun berikutnya yang memberikan indikasi sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi memberikan tambahan pada pendapatan masyarakat.

Menurut Todaro (2009:72) peran kemajuan teknologi menjadi faktor residu dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam bentuk yang formal, penjelasan standar model pertumbuhan Neoklasik Solow menggunakan fungsi produksi agregat. Dalam hal ini dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah persediaan modal (yang mencakup modal manusia dan modal fisik), L adalah tenaga kerja dan A adalah mewakili produktivitas tenaga kerja yang tingkat pertumbuhannya ditentukan secara eksogen.

Menurut Nelson (2006:100-101) laju pertumbuhan penduduk tidak selalu sama pada berbagai tingkat pendapatan. Pada tingkat pendapatan perkapita yang sangat rendah tingkat kematian lebih besar dari pada tingkat kelahiran, maka penambahan penduduk adalah negatif. Pada pendapatan perkapita yang lebih tinggi tingkat kematian akan menurun, akan tetapi tingkat kelahiran tidak berubah, oleh karena itu semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita maka semakin kecil tingkat kemunduran penduduk.

Pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets (1971;99) “Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya“. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Sedangkan Smith juga berpendapat dalam teorinya yaitu terdapat tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya alam yang bersifat membatasi pertumbuhan ekonomi, sumber daya modal yang bersifat aktif, dan sumber daya manusia atau jumlah penduduk yang cenderung mengikuti perkembangan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output nasional. Pertumbuhan Output ini dapat berupa barang dan jasa yang dipengaruhi oleh sumber alam, tenaga kerja, dan jumlah persediaan barang.

Menurut Harrod dan Domar (2012;229) “kunci dari pertumbuhan itu adalah investasi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan, kedua ia memperbesar kapasitas produksi dengan cara meningkatkan stok modal.” Hal ini dapat disebut sebagai dampak permintaan dan penawaran. Karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar.

Prof. W.W. Rostow (2012;142) memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan ada lima tahap pertumbuhan ekonomi yaitu :

- (1) Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-newton dan sebagai hasil pandangan pra-newton terhadap dunia fisika. Masyarakat mempunyai keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern namun tertumbuk pada adanya suatu batas.
- (2) Prasyarat untuk tinggal landas, merupakan masa transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Prasyarat tinggal landas ini didorong oleh empat kekuatan yaitu era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan reformasi. Kekuatan ini menempatkan “penalaran dan ketidakpercayaan” sebagai pengganti kepercayaan dan kewenangan yang mengakhiri fedeolisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan.
- (3) Tinggal landas, merupakan titik yang menentukan didalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normal, kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Dengan istilah kepentingan bersama rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur, seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok.
- (4) Dewasa (maturity), dimana tahap ini merupakan tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa empat dasawarsa. Pada masa ini ada tiga perubahan yaitu sifat tenaga kerja, watak para

pengusaha dan masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan suatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

- (5) Masa konsumsi massal, merupakan tahap terakhir bagi pertumbuhan. Dimana pada masa ini ditandai dengan banyaknya masyarakat bermigrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Pada tahap ini “keseimbangan perhatian masyarakat beralih dari penawaran menjadi permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas.

Untuk itu infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman, yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan suatu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam pembiayaan kegiatannya (BPS, 2015:15)”. Untuk itu jika sumber penerimaan daerah itu

sendiri terus ditingkatkan guna untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan perencanaan tujuan yang baik.

Jumlah penduduk juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah, tetapi pengaruh pertambahan jumlah penduduk tidak sebesar pengaruh dari penambahan PDRB. Terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah banyak yang berpendapat bahwa daerah yang memiliki PAD yang besar dan dapat dialokasikan dengan baik akan mendorong percepatan pertumbuhannya.

Menurut Ahmad Yani (2002:39) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya Pendapatan asli daerah ini maka daerah akan lebih mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan dan dapat mengukur tingkat kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurut Soemitro (1992:7) Negara Indonesia mempunyai falsafah negara yang disebut pancasila, maka dengan sendirinya falsafah pajak bersandar pada pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila. Asas pancasila yang digali dari kebudayaan rakyat indoonesia menjadi dasar segala hukum yang

berlaku. Dasar hukum pajak diletak dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 Republik Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

Menurut Khusaini (2006:33) “Salah satu wujud dari kewenangan pemerintah daerah yaitu memberikan sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 14 tahun 2000 dan di tindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Penetapan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pada pertimbangan pemungutan pajak hampir disemua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis maupun praktek baik .

Selain itu Pendapatan Asli Daerah ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah kemudian dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber utama keuangan daerah.

Menurut Mardiasomo (2003:98) Berdasarkan atas dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Berikut penjelasan dari bagian-bagian tersebut.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah diperoleh dari kewajiban masyarakat yang menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, akan tetapi bukan sebagai hukuman. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan oerundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1) Pajak provinsi, terdiri dari :

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran

- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak lain-lain

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-undang No. 34 Tahun 2000). Jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ditetapkan oleh peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e) Dan retribusi lainnya.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan kebersihan
- c) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- d) Retribusi pasar
- e) Dan retribusi lainnya.

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu, dan
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Dan pungutan retribusi lainnya yang bersifat komersial.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut :

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek

3. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Salah satu penyebab di berlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah atau yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Alternatif untuk

memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

2.1.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan sangat berperan terhadap pembangunan pemerintah kabupaten atau kota. Dari segi kontribusinya terhadap penerimaan daerah persentase kontribusi dana perimbangan menurun, namun jumlah dana perimbangan yang diterima selalu naik dari tahun ke tahunnya. Adapun dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dalam menjalankan desentralisasi pemerintah daerah sering mengalami kekurangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya penerimaan daerah dan dana belanja daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan kepada setiap daerah. Dana perimbangan ini bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain bertujuan untuk menambah APBD dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah.

Menurut Khusaini (2006:35) “untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan

dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah.” Guna pemerintah pusat melakukan hal ini adalah untuk menambah penerimaan daerah dalam melakukan pembiayaan pengeluaran agar kegiatan perekonomian terus berjalan dengan baik. Pola bagi hasil penerimaan daerah dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasilan. Penetapan tambahan penerimaan ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri dan hasilnya juga diterima oleh daerah yang bersangkutan. Misalnya dapat diberlakukan atas pajak penghasilan orang pribadi atau bea cukai.

Amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah adalah terciptanya kemandirian daerah dalam pengurusan daerahnya sendiri sebagai daerah otonom dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan kemandirian daerah, maka setiap tahunnya Pemerintah Pusat mengalokasikan transfer dana ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri :

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasil (PP) Pasal 25 dari Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam Negeri dan PPh 21.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Salah satu Tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin besar tingkat DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah.

Selain itu penjelasan tentang dana perimbangan juga terdapat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan khusus suatu daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan-

kebutuhan daerah yang bersifat khusus. Kegiatan khusus suatu daerah yang dimaksud yaitu untuk membiayai sarana prasarana pembangunan, infrastruktur dan lain sebagainya. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, contohnya kebutuhan di daerah transmigrasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 menyatakan bahwa “pembagian dana alokasi khusus kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah”. Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat dan selalu menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.1.4 Pengeluaran Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat.

Menurut Sadano Sukirno (2000:192) Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Guritno (2001:169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu teori mikro dan teori makro. Dalam teori mikro pengeluaran pemerintah terdiri dari faktor-faktor yang menimbulkan pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan teori makro terdiri dari pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai dan untuk transfer payment (subsidi, dana pensiun, dll).

Menurut Dumary (1996:157) pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yang menyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X,M = Ekspor dan Impor

Dalam kancah perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran yaitu :

1. Peran Alokatif

Peran alokatif merupakan peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Dalam kegiatan ekonomi sering kali timbul akibat-akibat sampingan yang dirasakan oleh masyarakat. Akibat sampingan (*side effects*) yang dimaksud bisa bersifat positif, sehingga turut dinikmati oleh masyarakat yang tidak terlibat dalam pengadaannya.

2. Peran Distributif

Peran distributif adalah peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran distributif pemerintah dapat ditempuh baik melalui jalur penerimaan maupun pengeluaran. Dari sisi penerimaan, pemerintah mengenakan pajak dan memungut sumber-sumber pendapatan lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil. Dengan pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.

3. Peran stabilisatif

Peran stabilisatif adalah peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian ekonomi dan memulihkan jika berada dalam keadaan disequilibrium. Kegiatan menstabilisasi perekonomian ini yaitu dengan menggabungkan kebijakan moneter dan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan

perdagangan guna untuk meningkatkan atau mengurangi permintaan agregat sehingga tetap mempertahankan fullemployment.

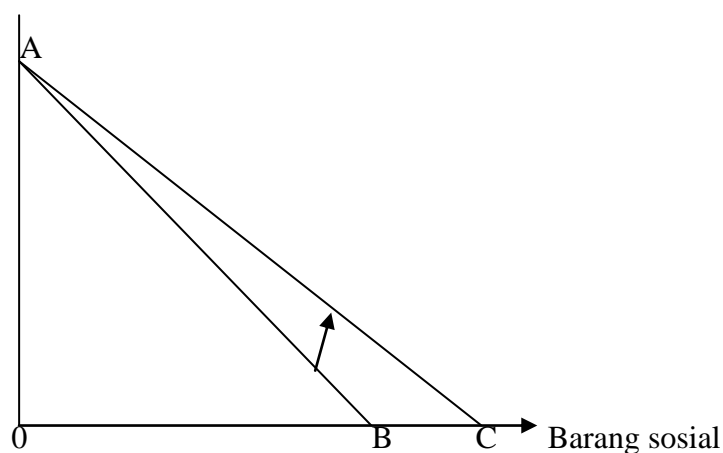
4. Peran dinamisatif

Peran dinamisatif adalah peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000:67) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan konsep budget line dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Perubahan Budget Line karena adanya pengeluaran pemerintah
Barang lain



Sumber : Sadono Sukirno (2000:71)

Semula dengan anggaran tertentu area komunikasi berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang soaial, misalnya: subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis anggaran bergeser kekanan yakni garis AC. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, karena peningkatan agregat demand akan mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi.

Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang membuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (pusat-provinsi-daerah).

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson, 1998). Oleh kerena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankan. Fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan

2. Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan
3. Fungsi pembangunan, yakni keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana
4. Fungsi perwakilan, yakni menyatakan pendapat daerah diluar bidang tanggung jawab eksekutif
5. Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Dalam era desentralisasi pemerintah mempunyai kewajiban dalam menjalankan dengan baik kegiatan ekonomi sehingga dapat tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Agar hal ini dapat tercapai salah satu langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu pemerintah perlu melakukan pengeluaran atau belanja. Pengeluaran pemerintah dalam belanja daerah diperoleh dari seluruh pendapatan daerah yang diterima baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri

dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja pemerintah dapat diklasifikasi berdasarkan hubungannya dengan aktivitas sehingga belanja di kelompokkan menjadu dua bagian yaitu :

a) Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Seperti belanja pegawai/honorarium, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

b) Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah di tetapkan oleh undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pengeluaran pemerintah juga dilakukan untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki struktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan rakyat. Dengan kata lain pemerintah memiliki kewajiban

mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Agar terwujudnya sasaran yang tepat dalam pengumpulan dan pembiayaan maka pemerintah menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja.

Menurut Abdul Halim (2014:227) Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya, struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang masing-masing secara tegas harus dicantumkan bersamaan dengan jumlah anggaran dan realisasi anggaran periode sebelumnya.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Abdul Halim, 2014:228).

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD (Abdul Halim, 2014:228)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak langsung dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok *hutang (principal outstanding)* berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
- d. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat atau secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- e. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat. Bantuan sosial

diberikan tidak secara terus menerus berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntuksn penggunaannya.

- f. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yaitu bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemberataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan pemerintah yang bersifat khusus pengelolaannya diserahkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja yang dapat diukur (Abdul Halim, 2014:228).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah pusat.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gudang/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- c. Belanja kodal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalna, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan pembangunan aset tetap nerwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangunan aset.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari latar belakang dan landasan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1. : Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Prakarsa, 2014	Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi kasus di Kabupaten Kota Jawa Timur)	Dari hasil analisis data Panel Rando Effect Model diperoleh bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif, lalu belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2	Taosige Wau dan Jhon Firman Tau, 2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah	Dari hasil estimasi model penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan adalah dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

		Kabupaten Nias Selatan.	Kabupaten Nias Selatan. Dari kedua variabel bebas yang digunakan, variabel pendapatan asli daerah yang lebih dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Selatan dari pada dana perimbangan.
3	Wulan Fauznyi, 2013	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun	Berdasarkan estimasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi 5 %. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi 5 %. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi 5 %

2.3 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sementara tentang penelitian ini yaitu “Diduga Terdapat Pengaruh Positif dan secara Signifikan dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak Tahun 2006-2016.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil lokasi di Kabupaten Siak, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Siak merupakan suatu kategori daerah penyumbang PDRB yang tinggi baik dari segi sektor migas dan non migas di Provinsi Riau, Kabupaten Siak juga memiliki pusat wisata dengan berbagai destinasi sejarah para kesultanan yang mana hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu Kabupaten Siak juga menerima berbagai penerimaan pendapatan selain dari pendapatan asli daerah juga dana perimbangan, dengan penerimaan pendapatan tersebut pemerintah akan melakukan pengeluaran salah satunya yaitu pengeluaran belanja pemerintah. Dengan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka dalam penelitian ini tidak terdapat populasi dan sampel penelitian. Dalam penulisan diperlukan data yang bersifat Time Series (data berkala) selama 11 tahun yaitu dari tahun 2006-2016.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder ini diperoleh dari beberapa instansi sebagai berikut :

- a. BPS Provinsi Riau, data yang diperoleh adalah data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.
- b. BPS Kabupaten Siak, data yang diperoleh adalah data dana perimbangan, pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah tahun 2006-2016 dan Gambaran umum Kabupaten Siak tahun 2017.
- c. Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak, data yang diperoleh adalah data yang berkaitan dengan keuangan dan pembiayaan daerah.

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari dan mengutip teori-teori dari sejumlah literatur yang berupa buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan informasi dan terkait data yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang telah tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak.

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dari tahun ke tahun

berikutnya yang digambarkan dengan perkembangan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Dana Perimbangan (X_1)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak.

3. Pendapatan Asli Daerah (X_2)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4. Pengeluaran Belanja Pemerintah (X_3)

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam APBN dan APBD.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif dan analisa kuantitatif. Analisa deskriptif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan sejumlah peristiwa dan objek penelitian yang ditabulasikan kedalam tabel-tabel serta mengkaitkan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Disamping itu, menggunakan metode yang bersifat

analisa kuantitatif yaitu analisa dengan mengukur kuatnya hubungan linier antara variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas (independent variabel) yang disimbolkan dengan variabel X yaitu Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dan variabel terikat (dependent Variabel) yang disimbolkan dengan Y (Pertumbuhan Ekonomi).

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak Tahun 2006-2016, karena memiliki dua variabel maka analisa ini menggunakan regresi linear berganda dan untuk mengolah data digunakan alat bantu komputer menggunakan program Eviews9 dengan penjelasan sebagai berikut:

3.5.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini merupakan regresi untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel-variabel terikat. Adapun persamaan regresi linear berganda yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Supranto 2009:181)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto (Rp)

X₁ = Dana Perimbangan (Rp)

X₂ = Pendapatan Asli Daerah (Rp)

X₃ = Pengeluaran Belanja Pemerintah (Rp)

a = Konstanta

e = Error

b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

3.5.2 Uji Statistik

Selain itu untuk mengetahui analisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi penulis juga menggunakan model berbagai uji untuk pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan mempunyai pengaruh secara positif atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t signifikan terhadap $\alpha = 0,05$ dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $H_0 : \beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (individu).

Jika $H_0 : \beta > 0$, berarti ada pengaruh positif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (individu).

Dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a) Jika $t \text{ Prob} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).
- b) Jika $t \text{ Prob} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).

2. Koefisien determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. Uji F (Simultan)

Uji F atau uji simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- a) Jika $F_{hitung} < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak. Artinya secara simultan ada pengaruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $F_{hitung} > \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima. Artinya secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dengan menggunakan 4 (empat) jenis pengujian berikut:

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi yang tinggi variabel independen tersebut, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi terganggu. Bila

nilai *Centered* VIF < 10 maka model tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Bila nilai *Centered* VIF > 10 maka model ditemukan adanya multikolinieritas.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang bersifat normal. Dapat dilihat dari nilai probabilitas nilai Jarque-Berra dengan kriteria sebagai berikut, yaitu jika probabilitas lebih besar dari nilai *alpha* yang ditentukan, yaitu 5%, maka data dikatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya jika probabilitas kurang dari 5%, maka data tidak berdistribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan White Test, dimana hipotesa yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

Hipotesa

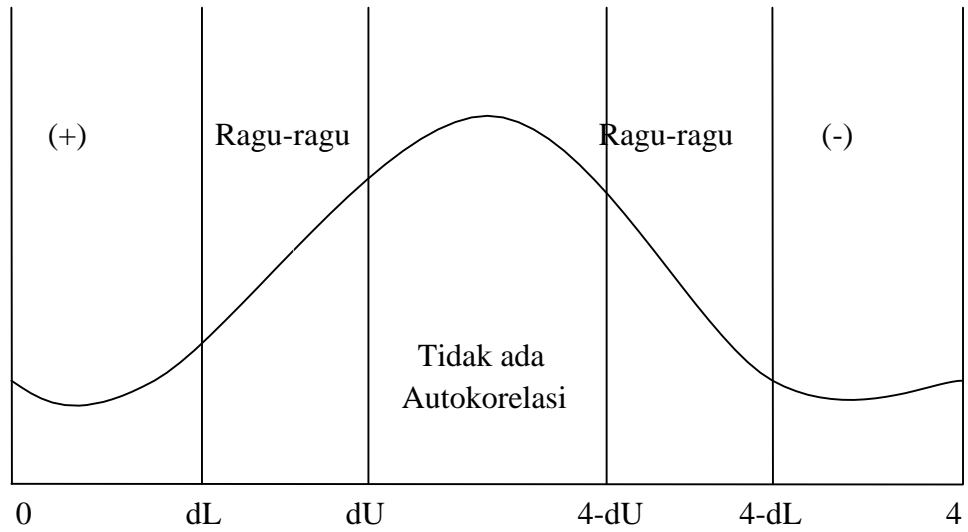
Ho: Tidak ada Heteroskedastisitas

Ha: Ada Heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan penggunaan periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya

autokorelasi perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan statistik *Durbin Watson* (D-W).



Gambar 3.2 Durbin-Watson Test

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Dimana Kabupaten ini salah satu pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten ini adalah salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan dan urbanisasi yang tinggi. Dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Siak merupakan suatu kategori daerah penyumbang PDRB yang tinggi baik dari segi sektor migas dan non migas di Provinsi Riau, selain itu Kabupaten Siak juga memiliki pusat wisata dengan berbagai destinasi sejarah para kesultanan yang mana hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4.2 Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di daerah ini. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memimpin. Namun daerah ini tetap diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.⁶ Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura.

Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan

Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden.

Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di

tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

4.3 Keadaan Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten Siak terletak pada posisi 1016'30"LU sd 0020'49"LU dan 1000 54'21"BT sd 102014'59"BT. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 Km2 dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari daratan rendah dan di bagian timur dan sebagian daratan tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah oganosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa tanah basah. Kabupaten Siak merupakan daerah lahan gambut dan sangat rentan terhadap kebakaran lahan pada

musim kemarau. Sehingga Kabupaten Siak juga sudah merupakan salah satu hot spot di Indonesia, karena merupakan langganan kebakaran setiap musim kemarau.

Akhir tahun 2007 wilayah Kabupaten Siak telah dimekarkan dari 13 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Siak, Mempura, Dayun, Bunga Raya, Sungai Mandau, Sungai Apit, Sabak Auh, Minas, Kandis, Tualang, Koto Gasib, Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Pusako, yang masing - masing di pimpin oleh seorang camat. Untuk lebih jelasnya berikut pembagian daerah Kabupaten Siak berdasarkan luas wilayah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan Di Kabupaten Siak tahun 2017

No	Kecamatan	Luas / Areal	
		Km ²	Persentase
1	Minas	346,35	4,05
2	Kandis	1.493,65	17,46
3	Siak	894,17	10,45
4	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5	Sungai Mandau	1.705,00	19,93
6	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	704,70	8,24
10	Dayun	232,24	2,71
11	Bunga Raya	151,00	1,76
12	Mempura	437,45	5,11
13	Sabak Auh	73,38	0,86
14	Pusako	544,47	6,36
Jumlah		8.556,09	100

Sumber: BPS Kabupaten Siak Dalam Angka, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Sungai Mandau yang merupakan Kecamatan yang luas yaitu 19,93% dari keseluruhan Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak kemudian ditambah Kecamatan Kandis dan Sungai Apit. Sedangkan yang memiliki luas wilayah yang di kategorikan kecil yaitu Kecamatan Sabak Auh yakni sebesar 0,86 dari seluruh luas daerah Kabupaten Siak.

4.4 Pemerintahan Kabupaten Siak

Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai ibukota hingga sekarang berkembang dari tahun ketahun dan bisa saja berubah dengan kemajuan pembangunan dan teknologi dewasa ini. Kabupaten Siak dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan bersama untuk diutamakan di pemerintah Kabupaten Siak. Dengan ini di harapkan pemerintah bisa menjawab setiap persoalan yang di hadapi sering bermunculan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan hal lainnya dalam masyarakat.

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan dengan Undang Undang No.53 tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Siak secara administrasi di kepalai oleh seorang Bupati atau Kepala Daerah yang didampingi oleh seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya kepala pemerintahan di bantu oleh tiga organisasi yaitu: Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengawas. Berikut tabel tentang jumlah kelurahan dan desa yang terdapat di Kabupaten Siak sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	RW	RT
1	Minas	4	1	28	81
2	Kandis	8	3	65	187
3	Siak	6	2	19	56
4	Sungai Apit	14	1	67	157
5	Sungai Mandau	9	-	30	63
6	Kerinci Kanan	12	-	69	193
7	Lubuk Dalam	7	-	32	111
8	Tualang	8	1	47	234
9	Koto Gasib	11	-	48	144
10	Dayun	11	-	69	203
11	Bunga Raya	10	-	60	152
12	Mempura	7	1	25	54
13	Sabak Auh	8	-	43	93
14	Pusako	7	-	20	45
Jumlah		122	9	622	1773

Sumber : BPS Kabupaten Siak Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 banyak Kecamatan dengan jumlah Desa terbanyak adalah Kecamatan Sungai Apit yaitu dengan jumlah 14 Desa, 67 Rukun Warga dan 157 Rukun Tetangga. Sedangkan Desa yang jumlahnya lebih sedikit terdapat di Kecamatan Minas dengan jumlah 4 Desa, 28 Rukun Warga, 81 Rukun Tetangga defenitif. Begitu pula yang paling banyak terdapat kelurahannya adalah di Kecamatan Kandis dengan jumlah 3 Kelurahan.

Daerah Siak Sri Indrapura adalah sebagai ibukota disaat sekarang ini mungkin ada perkembangan dari tahun ke tahunnya, perubahan ini karena dengan

semakin majunya pembangunan dewasa ini. Kabupaten Siak di dalam melaksanakan sistem pemerintahannya dan pembangunan menjadi harapan bersama untuk diutamakan di pemerintahan Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak dalam perannya menjalankan sistem pemerintahannya yang baik, telah melakukan berbagai upaya terutama untuk menciptakan peningkatan terhadap kesempatan kerja masyarakat dalam mensejahterakan rakyat. Dalam kaitannya dengan hal diatas ada beberapa pemerintahan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Siak (BAPEDA Kabupaten Siak) :

1. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan.
 - a. Manfaat keunggulan komperatif (Comparative advantage) yaitu potensi khusus Kabupaten Siak yang beragam seperti tinggi sungai, rawa, dataran, perbukitan yang untuk pengembangan produksi perekonomian masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing.
 - b. Memanfaatkan lahan yang ada untuk kegiatan perekonomian yang produkti seperti pembangunan kebun sawir untuk masyarakat.
 - c. Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan untuk menjaga kelestarian alam.
 - d. Meningkatkan kualitas dan semua kualitas produk yang dihasilkan untuk bisa bersaing di pasar global
 - e. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berdemensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peran masyarakat

- f. Membentuk hak-hak dasar masyarakat yang meliputi hak atas sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, lingkungan hidup, sumber daya alam, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
 - g. Peningkatan investasi dan ekspor non migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi yang biayanya tinggi dengan meyszerhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha.
 - h. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kebijakan yang di arahkan untuk mengembangkan UKM, usaha skala mikro dalam rangka peningkatan pendapatan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memperluas kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wira usaha baru keunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor dan peningkatan kelembagaan koperasi.
 - i. Peningkatan pengolahan BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD.
 - j. Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan pengembangan kebijakan pasar tenaga kerja dan penataan hubungan industrial yang mencerminkan asas keadilan.
2. Membangun infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan untuk memajukan sektor pertanian, industri dan jasa

- a. Membangun akses transportasi yang baik ke arah jalan lalu lintas Kabupaten
 - b. Membangun jembatan Tengku Latifah yang bertujuan untuk mempermudah transportasi darat yang menghubungkan Kecamatan Siak dan Lubuk Dalam ke arah Pekanbaru yang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau
 - c. Membangun irigasi untuk meningkatkan kualitas pertanian kedepan yang lebih maju khususnya Kabupaten Siak, mengingat bahwasannya Kabupaten Siak merupakan tempat agraris yang di tempatkan di Kecamatan Bunga Raya
 - d. Membangun infrastruktur dengan memanfaatkan APBD Kabupaten yang besar secara efisien dan sesuai skala prioritas serta menjalankan kerjasama dengan Pemprov dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- a. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan tenaga kerja khususnya yang berbasiskan pada kompetensi untuk bisa bersaing di pasar global.
 - b. Pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan terutama di luar Kecamatan Sabak Auh dan lain sebagainya.
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penciptaan lingkungan bersih dan sehat
 - d. Meningkatkan promosi, pembinaan dan pengawasan kesehatan terhadap diri sendiri, rumah, dan lingkungan.

4. Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih dan berwibawa
 - a. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah
 - b. Menuntaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pekayanan dan masyarakat
 - c. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik
 - d. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi
 - e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah melalui penataan kelembagaan
 - f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
 - g. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu Siak berdasarkan iman dan taqwa
 - a. Memperkuat pendidikan, pembinaan keagamaan, dan moral untuk masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak negatif dari globalisasi
 - b. Masyarakatkan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran melayu kedalam setiap lapisan kehidupan sehingga budaya melayu menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan

- c. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama
- d. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan agama pada semua jalur, majelis dan jenjang pendidikan
- e. Peningkatan kualitas tenaga kerja kependidikan agama dan keagamaan
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat dan membayar zakat, wakaf, infaq dan shadaqoh serta peningkatan profesionalisme tenaga pengelola
- g. Peningkatan kualitas panataan dan pengolahan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah
- h. Pembinaan keluarga harmonis untuk menepatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika
- i. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
- j. Peningkatan kerjasama interen dan antara umat beragama di bidang sosial ekonomi.

4.5 Kependudukan

1) Penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk

Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan masyarakat melalui e-sensus. Berdasarkan hasil sensus penduduk ini pesatny penambahan penduduk di

Kabupaten Siak mengakibatkan penyebaran tidak merata yang membawa identitas penduduk tidak seimbang diantara 14 Kecamatan yang ada.

Untuk lebih jelas tabel dibawah ini akan mempersentasikan luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Siak.

Tabel 4.3 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Di Kabupaten Siak tahun 2017

No	Kecamatan	Luas / Areal		Penduduk (Jiwa)		Kepadatan penduduk (Orang/Km ²)
		Km ²	%	Jumlah	%	
1	Minas	346,35	4,05	32.098	6,90	93
2	Kandis	1.493,65	17,46	72.646	15,61	49
3	Siak	894,17	10,45	27.462	5,90	31
4	Sungai Apit	1.346,33	15,74	30.196	6,49	140
5	Sungai Mandau	1.705,00	19,93	9.143	1,96	5
6	Kerinci Kanan	128,66	1,50	27.982	6,01	217
7	Lubuk Dalam	155,09	1,81	21.007	4,51	135
8	Tualang	343,60	4,02	128.202	27,55	373
9	Koto Gasib	704,70	8,24	22.610	4,86	32
10	Dayun	232,24	27,1	32.436	6,97	140
11	Bunga Raya	151,00	1,76	26.148	5,62	173
12	Mempura	437,45	5,11	17.464	3,75	40
13	Sabak Auh	73,38	0,86	11.995	2,58	163
14	Pusako	544,47	6,36	6.026	1,29	11
Total		8.556,09	100	465.414	100	54

Sumber : BPS Kabupaten Siak dalam angka, 2018

Pada tabel 4.3 diatas terlihat bahwa jumlah penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Tualang yaitu sebanyak 128,202 jiwa atau 27,55 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Siak dengan jumlah penduduk 373 Jiwa tiap-tiap km² nya dengan luas wilayah 343,60 km². Jika dibandingkan dengan

Kecamatan Sungai Mandau. Kecamatan Tualang memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Mandau namun mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dengan kepadatan penduduk. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk lebih sedikit adalah Kecamatan Pusako sebanyak 6.026 jiwa dengan luas areal 544,47 km².

Adapun penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk ini dipengaruhi oleh oleh faktor Fertilitas (Kelahiran), Mortalitas (Kematian) dan Migrasi.

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan Di Kabupaten Siak tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Minas	16.428	15.670	32.098	105
Kandis	37.293	35.353	72.646	105
Siak	13.975	13.486	27.461	104
Sungai Apit	15.223	14.973	30.196	102
Sungai Mandau	4.709	4.434	9.143	106
Kerinci Kanan	14.470	13.512	27.982	107
Lubuk Dalam	10.644	10.363	21.007	103
Tualang	66.228	61.974	128.202	107
Koto Gasib	11.508	11.102	22.610	104
Dayun	16.860	15.576	32.436	108
Bunga Raya	13.376	12.772	26.148	105
Mempura	8.920	8.544	17.464	104
Sabak Auh	6.052	5.943	11.995	102
Pusako	3.151	2.875	6.026	110
Total	283.225	268.458	465.414	106

Sumber : BPS Kabupaten Siak Dalam Angka, 2018

Jika dilihat dari Tabel 4.4 diatas dapat dilihat jumlah penduduk di Kabupaten Siak menurut kelompok umur dan jenis kelamin, dimana pada tahun 2017 yaitu sebanyak 465.414 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 283.225 jiwa dan 268.458 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan jumlah rasio jenis kelamin sebesar 106.

Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Siak tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	28.127	27.891	56.018
5-9	26.500	25.754	52.254
10-14	22.808	22.479	45.287
15-19	19.442	18.648	38.090
20-24	19.073	18.127	37.200
25-29	21.056	20.663	41.719
30-34	21.278	21.663	42.941
34-39	21.180	20.771	41.951
40-44	20.160	17.246	37.406
45-49	14.064	11.414	24.478
50-54	9.278	7.751	17.029
55-59	6.809	5.798	12.607
60-64	4.146	3.555	7.701
65-69	2.337	2.156	4.493
70-74	1.286	1.239	2.525
75+	1.293	1.422	2.715
Jumlah	238.837	226.577	465.414

Sumber : BPS Kabupaten Siak Dalam Angka, 2018

Jika dilihat dari tabel 4.5 diatas penduduk Kabupaten Siak menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017 yaitu sebanyak 465.414 jiwa, yaitu

terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 238.837 jiwa dan 226.577 jiwa untuk perempuan.

Bila dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017, maka penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Sedangkan penduduk terbanyak terdapat pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 56.018 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil terdapat pada umur 70-74 yaitu sebanyak 2.525 jiwa.

4.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi ini yang sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Dimana perekonomian suatu daerah dapat dikatakan baik dengan ditentukan oleh salah satu indikator makro ekonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah masing-masingnya atau dapat diukur dengan laju perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi suatu wilayah, tanpa

memperlihatkan pemilik atas faktor produksinya baik milik penduduk wilayah tersebut maupun milik penduduk wilayah lain.

Penyajian angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Berikut data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tanpa Migas di Kabupaten Siak yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2016 Dalam (Rupiah)

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tanpa Migas (Rupiah)
1	2006	10.126.724.320.000,00
2	2007	12.847.680.060.000,00
3	2008	16.418.617.820.000,00
4	2009	19.007.678.880.000,00
5	2010	32.672.772.650.000,00
6	2011	38.382.130.240.000,00
7	2012	40.305.122.580.000,00
8	2013	43.074.856.350.000,00
9	2014	48.347.376.810.000,00
10	2015	51.625.897.450.000,00
11	2016	54.737.214.220.000,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2018

Dari data tabel 4.6 diatas dapat dilihat laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga berlaku di Kabupaten Siak pada tahun 2006-2016 selalu mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 54.737.214.220.000,00 dan tahun terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 10.126.724.320.000,00.

Faktor penyebab terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi ini tiap tahunnya karena setiap sektor dalam suatu daerah memiliki potensi sumber unggulan yang berbeda. Artinya sektor yang tinggi akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak. Jika pertumbuhan ekonomi ini terus melaju tinggi akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat didaerah tersebut dan tidak akan terjadinya ketimpangan antar kecamatan maupun daerah lain.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Distribusi Variabel Penelitian

5.1.1 Perkembangan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Khusaini (2006:35) “untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah”. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasilan. Penetapan tambahan penerimaan ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri dan hasilnya juga diterima oleh daerah yang bersangkutan. Misalnya dapat diberlakukan atas pajak penghasilan orang pribadi atau bea cukai.

Dapat dilihat dari Dana Perimbangan di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi setiap tahunnya akan tetapi dengan hal ini tidak menjadikan alasan bagi pemerintah untuk tetap menjalankan tugas dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur dana perimbangan adalah jumlah total dari dana perimbangan tersebut. Adapun komponen dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan non pajak.

Berikut perkembangan dana perimbangan di Kabupaten Siak yaitu tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1: Perkembangan Dana Perimbangan di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006-2016 Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah Dana Perimbangan	Pertambahan Dana Perimbangan	Persentase (%)
2006	1.603.562.603.901,00	-	-
2007	1.275.080.380.497,18	-0.257616875	-25.76
2008	1.483.125.178.426,00	0.140274605	14.03
2009	1.323.563.714.264,00	-0.120554426	-12.06
2010	1.478.235.790.442,00	0.036984679	10.46
2011	1.489.288.269.445,00	0.007421316	0.74
2012	1.768.144.667.481,00	0.157711302	15.77
2013	1.768.816.719.820,00	0.000379945	0.04
2014	2.097.493.216.241,00	0.156699671	15.67
2015	1.218.107.619.715,00	-0.721927671	-72.19
2016	1.251.262.083.479,00	0.026496818	2.65

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil dana perimbangan dari tahun 2006-2016. Dana perimbangan pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.603.562.603.901,00 kemudian menyusul tahun 2007 menurun menjadi Rp. 1.275.080.380.497,18. Penurunan sebesar 0,257616875 atau dengan persentase 25,76 persen. Selanjutnya tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 1.483.125.178.426,00 dengan pertambahan sebesar 0,140274605 atau peningkatan persentase sebesar 14,03 persen. Dilihat pada tahun 2009 kembali penurunan sebesar Rp.1.323.563.714.264,00 dengan penurunan sebesar 0,120554426 atau dengan jumlah persentase 12,06 persen. Kemudian untuk tahun 2010 hingga 2014 kembali mengalami peningkatan. Untuk

tahun 2014 adalah pendapatan dana perimbangan yang tertinggi jika dibandingkan kesebelas tahun yang ada dengan jumlah sebesar Rp. 2.097.493.216.241,00, dengan penambahan sebesar 0,156699671 atau 15,67 persen.

5.1.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna untuk membiayai keperluan daerah yang bersangkutan dalam melakukan kegiatannya.

Menurut Ahmad Yani (2002:39) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah yaitu total dari pendapatan asli daerah itu sendiri.

Dapat dilihat dari perkembangan pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak mengalami berfluktuasi tiap tahunnya. Jika pendapatan asli daerah meningkat daerah akan menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya jika pendapatan menurun tentunya pemerintah akan terbatas dalam memfasilitasi masyarakat.

Berikut tabel serta penjelasan tentang perkembangan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

Tabel 5.2. : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006-2016 Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Pertambahan PAD	Persentase (%)
2006	141.674.790.678,00	-	-
2007	326.207.278.976,63	0.565690897	56.57
2008	733.276.414.277,78	0.555137363	55.51
2009	413.794.582.439,51	-0.772078334	-77.21
2010	262.896.647.312,60	-0.573981968	-57.40
2011	198.010.055.388,39	-0.327693418	-32.77
2012	346.604.319.540,25	0.428714404	42.87
2013	348.618.602.282,72	0.005777898	0.58
2014	309.862.790.957,13	-0.125074105	-12.51
2015	357.281.966.303,86	0.132721995	13.27
2016	164.325.689.823,87	-1.174230741	-117.42

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan hasil pendapatan asli daerah di Kabupaten Siak dari tahun 2006-2016. Pendapatan asli daerah terdapat pada tahun 2006 sebesar Rp.141.674.790.678,00 dengan pertambahan sebesar

0,565690897 dan persentasenya meningkat menjadi 56,57 persen ditahun 2007. Selanjutnya untuk tahun 2008 juga meningkat sebesar Rp. 733.276.414.277,78 dengan penambahan 0.555137363 dan persentasenya meningkat menjadi 55,51 persen. Kemudian tiga tahun berikutnya kembali mengalami penurunan dari tahun 2009-2011, pada tahun 2011 sebesar Rp.198.010.055.388,39 dengan penurunan menjadi 0,327693418 atau dengan persentase penurunan sebesar 32,77 persen. Kemudian tahun 2012 mengalami peningkatan dengan jumlah Rp.346.604.319.540,25 dengan penambahan sebesar 0,428714404 atau meningkat menjadi 42,87 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp. 164.325.689.823,87 dengan penurunan sebesar 1,174230741 atau sebesar 117,42 persen.

5.1.3 Perkembangan Pengeluaran Belanja Pemerintah di Kabupaten Siak

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini dapat berupa belanja daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan.

Menurut Sadano Sukirno (2000:192) Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam APBN atau APBD yang bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Siak mengalami fluktuasi akan tetapi lebih sering meningkat di tiap tahunnya. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pengeluaran pemerintah adalah jumlah atau total dari belanja pemerintah yang tergambar pada tabel dan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 5.3. : Perkembangan Pengeluaran Belanja Pemerintah di Kabupaten Siak Tahun 2006-2016 Dalam Rupiah

Tahun	Jumlah Belanja Pemerintah	Pertambahan Pengeluaran Belanja Pemerintah	Persentase (%)
2006	1.409.790.324.020,00	-	-
2007	1.903.275.258.312,32	0.259281957	25.93
2008	1.850.231.345.971,44	-0.02866888	-2.87
2009	1.929.418.660.938,00	0.041042059	4.10
2010	1.697.826.203.483,00	-0.136405279	-13.64
2011	1.676.721.824.656,00	-0.012586691	-1.26
2012	2.071.317.017.756,00	0.19050449	19.05
2013	2.285.374.036.987,60	0.092363889	9.37
2014	2.647.677.640.488,00	0.136838261	13.68
2015	2.690.439.086.559,13	0.015893854	1.59
2016	2.165.325.183.247,00	-0.242510412	-24.25

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari data diatas dapat dilihat Pengeluaran belanja pemerintah terdapat pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.409.790.324.020,00 dan meningkat ditahun 2007 sebesar Rp. 1.903.275.258.312,32 dengan penambahan 0,259281957 atau meningkat menjadi 25,93 persen. Menyusul tahun 2008 menurun menjadi Rp. 1.850.231.345.971,44 dengan penurunan sebesar 0,02866888 atau dengan persentasenya menjadi 2,87 persen. Kemudian tahun 2009 sebesar Rp. 1.929.418.660.938,00 kembali meningkat dengan penambahan sebesar 0,041042059 atau meningkat 4,10 persen. Tahun 2010-2011 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.676.721.824.656,00 dengan penurunan sebesar 0,012586691 atau menjadi 1,26 persen pada tahun 2011.

Selanjutnya untuk tahun 2012-2015 pengeluaran belanja pemerintah terus meningkat, dapat dilihat pada tahun 2015 merupakan tahun dimana pengeluaran belanja yang tertinggi jika dibandingkan sepuluh tahun yang ada yaitu sebesar Rp. 2.690.439.086.559,13 dengan penambahan sebesar 0,015893854 atau dengan persentasenya 1,59 persen. Akan tetapi untuk tahun 2016 kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp. 2.165.325.183.247,00 dengan penurunan sebesar 0,242510412 atau 24,25 ditahun 2016.

5.1.4 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah. Masalah ekonomi dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran, dalam hal ini pemerintah harus ikut campur tangan dalam jalannya perekonomian.

Penyajian angka Produk Domestik Regional Bruto yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku yaitu menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah dari PDRB dengan Migas tersebut. Berikut data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak yang dilihat dari sisi Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yaitu tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4 : Perkembangan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Migas dan Non Migas Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2016 Dalam (Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas	PDRB tanpa MIGAS	Hasil Selisih Migas
2006	26.215.711.860.000,00	10.126.724.320.000,00	16.088.987.540.000,00
2007	33.874.581.640.000,00	12.847.680.060.000,00	21.026.901.580.000,00
2008	44.918.496.360.000,00	16.418.617.820.000,00	28.499.878.540.000,00
2009	43.799.840.450.000,00	19.007.678.880.000,00	24.792.161.570.000,00
2010	54.420.353.850.000,00	32.672.772.650.000,00	21.747.581.200.000,00
2011	67.446.587.390.000,00	38.382.130.240.000,00	29.064.457.150.000,00
2012	79.303.427.520.000,00	40.305.122.580.000,00	38.998.304.940.000,00
2013	82.129.724.430.000,00	43.074.856.350.000,00	39.054.868.080.000,00
2014	85.735.522.140.000,00	48.347.376.810.000,00	37.388.145.330.000,00
2015	77.235.452.690.000,00	51.625.897.450.000,00	25.609.555.240.000,00
2016	78.943.381.950.000,00	54.737.214.220.000,00	24.206.167.730.000,00

Sumber : Data Olahan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat laju PDRB dengan Migas di Kabupaten Siak selama sebelas tahun dari 2006-2016. Pada tahun 2006 sebesar Rp. 26.215.711.860.000,00 dan terus meningkat hingga tahun 2014 yaitu sebesar Rp.

85.735.522.140.000,00 dimana tahun ini adalah jumlah PDRB yang tertinggi dibandingkan sepuluh tahun yang ada. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kelesuan yaitu menurun menjadi Rp. 77.235.452.690.000,00. Akan tetapi kembali naik pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 78.943.381.950.000,00. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terdapat perubahan PDRB atas dasar harga berlaku secara berkala.

Dari data tabel diatas dapat dilihat laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga berlaku di Kabupaten Siak pada tahun 2006-2016 selalu mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 54.737.214.220.000,00 dan tahun terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 10.126.724.320.000,00.

Selain itu dapat juga dilihat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan laju pertumbuhan di Kabupaten Siak tahun 2006-2016 dengan tabel 5.4 dibawah.

Dari tabel tersebut dapat dilihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Migas di Kabupaten Siak selama kurun waktu sebelas tahun dari 2006-2016. Tahun tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar Rp. 85.735.522.140.000,00 dengan pertumbuhan sebesar Rp. 4.390.368.694,00 dan tahun tertendah terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 77.235.452.690.000,00 dan dengan pertumbuhan menurun sebesar Rp. 991.429.134,00. Penurunan ini terjadi karena melemahnya pengelolaan dari hasil migas pada tahun tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.5 : Perkembangan Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Migas Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2016 Dalam (Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas	Pertumbuhan dengan Migas	PDRB tanpa MIGAS	Pertumbuhan tanpa Migas	Total PDRB	Pertumbuhan total PDRB
2006	26.215.711.860.000,00	-	10.126.724.320.000,00	-	36.342.436.180.000,00	-
2007	33.874.581.640.000,00	29.2148076	12.847.680.060.000,00	26.86906105	46.722.261.700.000,00	28.56117149
2008	44.918.496.360.000,00	32.60236492	16.418.617.820.000,00	27.79441692	61.337.114.180.000,00	31.28027614
2009	43.799.840.450.000,00	-2.49041264	19.007.678.880.000,00	15.76905613	62.807.519.330.000,00	2.397251924
2010	54.420.353.850.000,00	24.24783582	32.672.772.650.000,00	71.89249069	87.093.126.500.000,00	38.66671925
2011	67.446.587.390.000,00	23.93632643	38.382.130.240.000,00	17.47435901	105.828.717.630.000,00	21.51213521
2012	79.303.427.520.000,00	17.57959978	40.305.122.580.000,00	5.010124055	119.608.550.100.000,00	13.02088202
2013	82.129.724.430.000,00	3.563902593	43.074.856.350.000,00	6.871915014	125.204.580.780.000,00	4.678620948
2014	85.735.522.140.000,00	4.390368694	48.347.376.810.000,00	12.2403669	134.082.898.950.000,00	7.091048997
2015	77.235.452.690.000,00	-9.91429134	51.625.897.450.000,00	6.781175849	128.861.350.140.000,00	-3.894269031
2016	78.943.381.950.000,00	2.211328089	54.737.214.220.000,00	6.026658952	133.680.596.170.000,00	3.739869266

Sumber : Data Olahan, 2019

Sedangkan jika dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tanpa Migas Atas Dasar Harga berlaku di Kabupaten Siak pada tahun 2006-2016 selalu mengalami peningkatan. Dimana tahun tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 54.737.214.220.000,00 dengan pertumbuhan Rp. 6.026.658.952,00 dan tahun terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 10.126.724.320.000,00. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tanpa migas ini selama sebelas tahun terus mengalami peningkatan.

Dan jika dilihat dari total keseluruhan dari Produk Domestik Regional Bruto total tahun tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 134.082.898.950.000,00 dengan pertumbuhan sebesar Rp. 7.091.048.997,00 dan terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 36.342.436.180.000,00. Sedangkan jika dilihat dari total laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun tahun tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 38.666.719.250,00. Tahun ini merupakan peningkatan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan tahun lainnya. Sedangkan tahun terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.397.251.924,00.

5.2 Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan Program Eviews 9. Dilakukan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai Variabel Terikat sedangkan Dana Perimbangan (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Belanja Pemerintah (X_3) sebagai Variabel Bebas selama sebelas tahun dari Tahun 2006-2016 berikut ini hasil regresinya.

Tabel 5.6 : Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak Tahun 2006-2016

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 01/18/19 Time: 10:14
 Sample: 2006 2016
 Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Dana Perimbangan (X ₁)	17.82475	17.53127	1.016740	0.3431
PAD (X ₂)	-29.80713	29.25170	-1.018988	0.3421
Pengeluaran B.M (X ₃)	39.78426	12.04093	3.304086	0.0130
C	-3.69E+13	3.31E+13	-1.114656	0.3018
R-squared	0.671696	Mean dependent var		6.13E+13
Adjusted R-squared	0.530995	S.D. dependent var		2.14E+13
S.E. of regression	1.46E+13	Akaike info criterion		63.74124
Sum squared resid	1.50E+27	Schwarz criterion		63.88593
Log likelihood	-346.5768	Hannan-Quinn criter.		63.65003
F-statistic	4.773908	Durbin-Watson stat		1.042821
Prob(F-statistic)	0.040705			

Dari hasil pengolahan diatas maka didapat fungsi persamaan :

$$Y = -3,69 + 17.82475 X_1 - 29.80713 X_2 + 39.78426 X_3 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat diketahui pengaruh dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat dengan interpretasi sebagai berikut :

5.3 Interpretasi Hasil

5.3.1 Koefisien Regresi

Berikut ini penjelasan dari hasil persamaan diatas, yaitu Dana Perimbangan (X₁), Pendapatan Asli Daerah (X₂) dan Pengeluaran Belanja

Pemerintah (X_3) terhadap Laju Produk Domestik Regional Bruto (Y) di Kabupaten Siak tahun 2006-2016 dengan analisis regresi sebagai berikut :

- a. Konstanta β_0 : Artinya besarnya Laju Produk Domestik Regional Bruto jika Dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah sama dengan 0 adalah Rp. 369.000,00.
- b. Nilai koefisien β_1 sebesar 17,82475 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti bahwa variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.
- c. Nilai koefisien β_2 sebesar -29,80713 dan berdasarkan uji T (Parsial) berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.
- d. Nilai koefisien β_3 sebesar 39,78426 hal tersebut berarti bahwa variabel Pengeluaran Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016. Pengaruh tersebut artinya jika terjadi penambahan Pengeluaran Belanja Pemerintah maka juga akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 39,78426 pertahun.

5.3.2 Uji Statistik

1) Uji T (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu independent variabel individu dalam menjelaskan dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t signifikan dengan α 0,05. Dengan kriteria sebagai berikut yaitu :

Jika $t \text{ Prob} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak

Jika $t \text{ Prob} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima

- a. Pengujian Pengaruh Dana Perimbangan (X_1) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)

Berdasarkan hasil uji T (Parsial), Maka diketahui nilai T Probabilitas Dana Perimbangan adalah ($0,3431 > \alpha 0,05$) Maka H_0 diterima. Artinya Dana Perimbangan tidak ada pengaruh yang secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

- b. Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)

Berdasarkan hasil uji T (Parsial), maka diketahui nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar ($0,3421 > \alpha 0,05$) Maka H_0 diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

- c. Pengujian Pengaruh Pengeluaran Belanja Pemerintah (X_3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Dan berdasarkan hasil uji T (Parsial) maka diketahui bahwa nilai T Probabilitas Pengeluaran Belanja Pemerintah adalah sebesar ($0,0130 < \alpha 0,05$) Maka H_0 ditolak. Artinya Pengeluaran Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

2) Koefisien Deteriminasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel bebas (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah) dapat menerangkan dengan baik variasi variabel terikat (Produk Domestik Regional Bruto) atau untuk mengatur kebaikan suatu model.

Jika semakin besar nilai koefisien determinasi mendekati 1, maka semakin besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,6716. Hal ini menunjukkan bahwa 67% variabel bebas (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (Produk Domestik Regional Bruto). Sedangkan sisanya adalah sebesar 33% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

3) Uji statistik F

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel bebas. Uji F ini dilakukan dengan membandingkan F Prob dengan α 0,05.

Dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

Jika $F_{\text{prob}} < \alpha$ 0,05 maka H_0 ditolak

Jika $F_{\text{prob}} > \alpha$ 0,05 maka H_0 diterima

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka dapat diperoleh F Prob sebesar ($0,040705 < \alpha$ 0,05). Maka H_0 ditolak, artinya Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

5.3.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan linier antara variabel independen. Adanya hubungan antara variabel dalam satu regresi disebut dengan multikolinieritas. Pengujian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai VIF dengan ketentuan jika nilai $VIF < 10$ maka model tidak ditemukan adanya multikolinieritas, dan jika nilai $VIF > 10$ maka model ditemukan adanya multikolinieritas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diketahui nilai VIF dari variabel independen yaitu VIF X_1 adalah 1,048111, nilai VIF X_2 adalah 1,024380 dan X_3 adalah 1,071223. Dapat dilihat bahwa nilai VIF dari ketiga variabel independen tersebut lebih kecil dari 10 yang artinya ketiga variabel tersebut tidak terkena multikolinieritas. Hal tersebut berarti antara Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah memiliki hubungan linear didalam model regresi tersebut.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah model regresi tersebut normal atau tidak bisa dilihat dari bentuk histogram residual yang pada umumnya berbentuk lonceng jika mempunyai distribusi normal dan juga melakukan Uji Jarque-Bera.

Dari hasil estimasi regresi, terlihat bahwa grafik histogram residual model regresi tersebut tidak berbentuk lonceng maka kedua variabel tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal. Sedangkan jika dilihat menggunakan uji Jarque-Bera diketahui bahwa nilai JB adalah 0,85 dan nilai *Chi Square* adalah 14,07. Nilai JB lebih kecil dari nilai *Chi Square* yang berarti model regresi tersebut mempunyai distribusi yang tidak normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mengatasi apakah model regresi tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak, bisa dilihat dari nilai *Chi Square* (Obs *R-Squared) dan nilai kritis *Chi Square* dengan ketentuan jika nilai *Chi Square* lebih kecil dari nilai kritis maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan jika *Chi Square* lebih besar dari nilai kritis maka terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, maka dapat diketahui bahwa nilai *Chi Square* (Obs *R-Squared) adalah 9,214538. Sedangkan nilai kritis *Chi Square* adalah sebesar 14,07. Maka dapat dilihat bahwa nilai *Chi Square* (Obs *R-Squared) lebih kecil dari nilai kritis yang artinya model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah dalam satu model regresi linear ada korelasi atau tidak ada korelasi antara variabel gangguan dengan

variabel gangguan lain. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Dari hasil olahan data, diketahui bahwa nilai D-W adalah sebesar 1,042821. Jika dilihat dari kurva D-W maka nilai tersebut terletak diantara 0 sampai $2 - d_u$ dan berada pada kriteria ragu-ragu pada autokorelasi. Hal tersebut berarti dalam model regresi linear tersebut ada autokorelasi dan tidak ada autokorelasi.

5.4 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan asli daerah selalu mengalami penurunan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Tentunya hal ini menggambarkan bahwa daerah belum mandiri dalam mengelola keuangan dan pemerintah daerah belum berhasil menggali potensi-potensi yang tersedia di daerah agar menambah pendapatan dan mendorong perekonomian yang lebih baik. Selain itu pendapatan ini juga sebagian besar digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah dan sebagian kecil nya lagi digunakan untuk berbagai kegunaan pemerintah baik dari segi pengeluaran pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sedangkan pengeluaran belanja pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Khusaini (2006:35) yang dinyatakan bahwa untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Guna pemerintah pusat melakukan hal ini adalah untuk menambah penerimaan daerah dalam melakukan pembiayaan pengeluaran agar kegiatan perekonomian terus berjalan dengan baik. Pola bagi hasil penerimaan daerah dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasilan. Penetapan tambahan penerimaan ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri dan hasilnya juga diterima oleh daerah yang bersangkutan. Misalnya dapat diberlakukan atas pajak penghasilan orang pribadi atau bea cukai.

Menurut Ahmad Yani (2002:39) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya Pendapatan asli daerah ini maka daerah akan lebih mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan dan dapat mengukur tingkat kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat.

Sesuai dengan teori Sadono Sukirno 2000:67 Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besar

penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Selain itu menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Febrian Dwi Prakarsa tahun 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012, diketahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dari hasil analisis data panel *Random Effect Model* diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif, sementara Belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan, lalu belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2008-2012.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Siak tahun 2006-2016 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan asli daerah selalu mengalami penurunan dan lebih rendah jika dibandingkan dengan dana perimbangan. Tentunya hal ini menggambarkan bahwa daerah belum mandiri dalam mengelola keuangan dan pemerintah daerah belum berhasil menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar menambah pendapatan dan mendorong perekonomian yang lebih baik. Selain itu pendapatan ini juga sebagian besar digunakan untuk berbagai kegunaan pemerintah baik dari segi pengeluaran pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sedangkan Pengeluaran Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016 atau dengan berdasarkan hasil uji T (Parsial) maka diketahui bahwa nilai T Probabilitas Pengeluaran Belanja Pemerintah adalah sebesar ($0,0130 < \alpha 0,05$) Maka H_0 ditolak yang artinya

Pengeluaran Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.

2. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka dapat diperoleh F Prob sebesar ($0,040705 < \alpha 0,05$). Maka H_0 ditolak, artinya Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Siak tahun 2006-2016.
3. Berdasarkan hasil olahan dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,6716. Hal ini menunjukkan bahwa 67% variabel bebas (Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Belanja Pemerintah) sudah mewakili untuk menjelaskan variabel terikat (Produk Domestik Regional Bruto). Sedangkan sisanya dari 33% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

6.2 Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

1. Untuk pemerintah dan instansi terkait, diharapkan pemerintah dapat menggunakan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dengan baik dan bijaksana dalam melakukan pengeluaran belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

2. Untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi-potensi sumber daya yang ada agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Diharapkan dengan adanya pendapatan dan pengeluaran belanja tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak dalam angka tahun 2006*. Siak Sri Indrapura. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak dalam angka tahun 2007*. Siak Sri Indrapura. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak dalam angka tahun 2008*. Siak Sri Indrapura. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak dalam angka tahun 2009*. Siak Sri Indrapura. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak dalam angka tahun 2010*. Siak Sri Indrapura. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak. *Siak dalam angka tahun 2017*. Siak Sri Indrapura. Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. *PDRB Provinsi Riau 2006-2016*. Provinsi Riau.
- Dumary. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta
- Fauzuni. 2013. Jurnal “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Kusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011.
- Febrian. 2014. Jurnal “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota Jawa Timur tahun 2008-2012.
- Firman, Taosige, 2017. Jurnal “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan”.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat Jakarta.
- Haris A, Munandar. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Nelson Moh, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Jhingan.2013.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*.Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Khusaini Moh. 2003. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw. Malang.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik, edisi ketiga*. BPFE. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah.
- Profil Kabupaten Siak. 2013. Provinsi riau.
- Rova dan Hasdi. 2014. Jurnal “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Sumatera Barat”.
- Soemitro Rochmat. 1992. *Pajak dan Perpajakan*. PT. Eresco Anggota IKAPI, Bandung.
- Sukirno. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Bina Grafika. Jakarta.
- Sukirno. 2006. *Ekonomi Pembangunan proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Presnadamedia Grup PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Sukirno sadono. 2000. *Makroekonomi edisi ketiga*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supranto. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Todaro Michael, Smith Stephen. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Undang-Undang No. 14 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.